

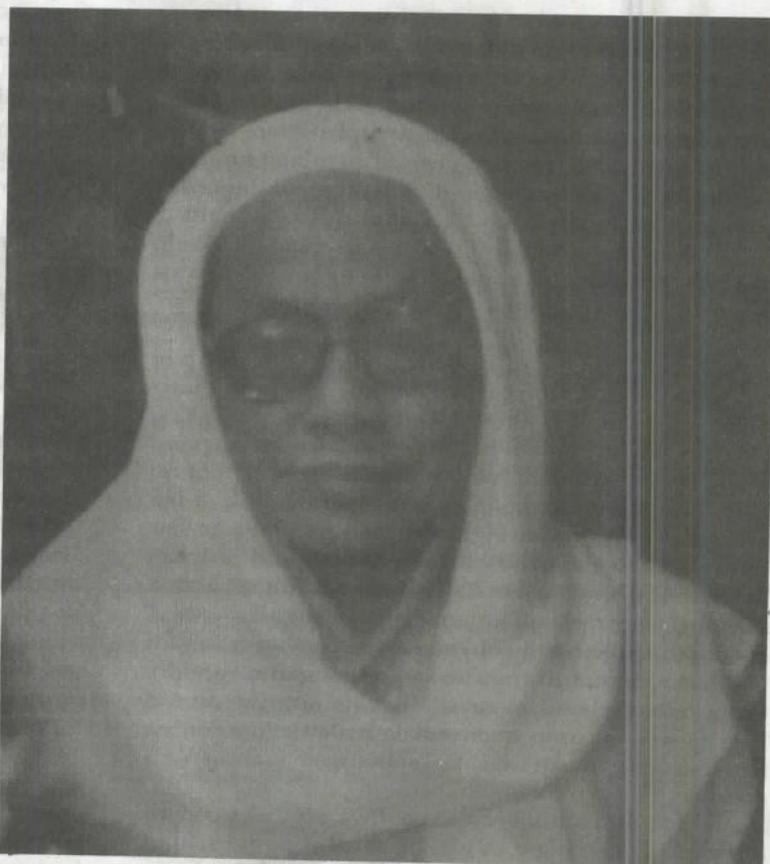
Kiai Achmad Siddiq (1926-1991), menurut antropolog dan pengamat NU, Martin van Bruinessen, adalah seorang kiai yang "bintangnya cepat menanjak". Mungkin pernyataan itu benar jika dilihat dari masa menentukan 'puncak karir' sang Kiai dari Jember itu, pada akhir 1983. Saat itu ia memukau peserta Munas NU di Situbondo dengan rumusan-rumusan "gencatan senjata", dengan menerima asas tunggal Pancasila dan menarik NU dari gelanggang politik praktis. Namun perjalanan pemikiran Kiai Achmad sesungguhnya telah dimulai jauh sebelum Munas monumental itu. Paling tidak dapat dirunut sejak penerbitan buku kecilnya bertajuk *Pedoman Berpikir Nahdlatul Ulama* pada tahun 1969 dan bukunya yang diterbitkan sepuluh tahun kemudian, *Khittah Nahdliyah* (Surabaya, 1979). Namun dengan kedua buku itu, 'bintang' Kiai Achmad memang belum muncul. Dapat dikatakan, sebelum 1983 pemikiran Kiai Achmad adalah "pemikiran yang tersisih" di dalam NU, di tengah-tengah arus deras permulaan *zero sum game* para pemimpin NU untuk menegakkan *Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah* di hadapan rejim politik baru, yang - kebetulan - disebut Orde Baru.

Watak pemikiran Kiai Achmad memang cenderung lebih 'kompromistik' dibandingkan dengan pemikiran ulama pendahulunya, seperti Kiai Bisri Mustofa maupun Kiai Ali Maksum. Namun, kedua kecenderungan itu harus dilihat lebih sebagai *kesinambungan dari pada keterputusan* pemikiran *Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah* di dalam NU. *Kesinambungan* itu tidak semata-mata bahwa kedua corak pemikiran itu sama-sama bertumpu pada pandangan *fihiyah*, tetapi juga pada semangat (*maqasid*) yang

Pemikiran Kiai Achmad Siddiq

Kejujuran yang Cerdik:

Tafsir Aswaja dalam Konteks Politik Orde Baru



dibawanya: yakni 'menyelamatkan' manusia dari kecenderungan destruktif yang lahir dari sistem sosial politik yang tidak demokratis. Keduanya sama-sama mengambil pola perlawanan kultural dengan cara menciptakan etika sosial yang bersumber dari *fiqh*. Pertama-tama dengan membangun masyarakat sipil di mana tertib hukum adalah

tulang punggung eksistensinya, dan kekuasaan tidak perlu mendasarkan diri pada kekuatan militer. Kedua, dengan fiqh pula, ideologi formal negara disaring begitu rupa, sehingga ideologi formal negara itu tidak perlu menjadi ordinarat di atas akidah dan syari'at Islam.

NU-Orde Baru : Hubungan yang Serba Kikuk

Lahirnya Orde Baru membuka era baru dalam kehidupan politik Indonesia. Meskipun secara resmi menyatakan akan menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila "secara murni dan konsekuen," namun Orde Baru pada 'politik sehari-hari'-nya menampilkan semangat "otoritarianisme birokratik." Hal ini ditandai dengan, pertama, de-ideologisasi kehidupan sosial politik. Kedua, berakhirnya era kepemimpinan sipil, segera setelah tampilnya perwira-perwira militer dalam *lapis atas* Orde Baru. Mereka berada di pusat kekuasaan atau pada posisi yang memungkinkan mereka berapresiasi ke pusat kekuasaan itu (meminjam istilah Bill Liddle, 1978). Ketiga, prioritas program pembangunan ekonomi di atas program-program lain. Langkah-langkah de-ideologisasi Orde Baru telah membuka - kurang lebih- "modern" dalam politik Indonesia. Kebijakan ini segera tampak dengan pembubaran partai-partai politik berdasarkan aliran ideologi dan pembentukan substitusi partai politik berdasarkan "program dan karya." Namun de-ideologisasi itupun sesungguhnya dibarengi dengan re-ideologisasi dengan menjadikan Pancasila sebagai (substitusi) ideologi tunggal bagi kehidupan bangsa dan masyarakat Indonesia. Pada kehidupan politik, pemerintah hanya terdiri dari ABRI dan Birokrasi. Sedangkan Golongan Karya, satu partai politik yang dibentuk pemerintah, menjadi 'mesin elektoral' yang bersama-sama dua partai kecil hasil peleburan partai-partai lama, PPP dan PDI, memainkan fungsi legitimasi bagi semua rencana pemerintah di Parlemen. Dengan suara mayoritas yang ditanggung - terutama- dari kalangan pegawai pemerintah, ditambah 100 kursi bagi ABRI yang diangkat Presiden, Parlemen menjadi 'jalan bebas hambatan' untuk merancang dan mensahkan semua kehendak

pemerintah.

Sementara itu, meskipun merupakan salah satu pendukung utama kelahiran Orde Baru, namun melihat gelagat dominasi pemerintah dalam kehidupan sosial dan politik itu, NU segera berbalik arah menjadi semacam "oposisi". (Liddle menggambarkan oposisi NU itu sebagai "oposisi yang jujur namun agak segan," *ibid*). Pada Pemilu Orde Baru 1971, NU menjadi penantang utama partai pemerintah, Golkar. Pada masa sebelum pemilu, banyak tokoh NU ditahan dan dilarang berbicara di depan umum. Isu-isu seputar monoloyalitas, pengangkatan anggota ABRI untuk DPR dan isu di seputar kebijakan ekonomi, menjadi sorotan kritik tajam NU terhadap pemerintah. Hubungan yang tegang ini juga disulut oleh RUU Perkawinan pada tahun 1974, dimasukkannya aliran kepercayaan dalam GBHN. "Oposisi" itu lebih tampak lagi pada Pemilu 1977. Meskipun telah bersama-sama partai-partai Islam kecil lainnya berada di bawah satu atap PPP, namun wajah NU sangat menonjol pada *PPP-bayi* itu. Dengan mengantongi suara hampir 30 % kursi, PPP agak 'powerfull' di DPR. Dalam suasana itu, Kiai Bisri dan seluruh anggota DPR PPP dari unsur NU melakukan *walk-out* atas pengesahan GBHN yang menyangkut Aliran Kepercayaan dan tentang P4. Terakhir, ketegangan pun tak terelakkan, setelah pemerintah mengajukan RUU tentang Asas Tunggal Pancasila pada awal 1980-an.

Stamina "radikalisme" NU itu memang tak terpisahkan dari visi *religio-politik* Rais Am ketika itu, yakni KH Bisri, yang teguh memperjuangkan tegaknya Aswaja dalam kehidupan sosial dan politik di Indonesia. Tuntutannya sesungguhnya sangat sederhana: "jangan campuri akidah dan ibadah kami." Tetapi mengapa kesan yang muncul begitu frontal dan keras? Hal ini mungkin disebabkan kurangnya pengetahuan pemerintah terhadap NU dan umat Islam pada umumnya, dan begitu pula sebaliknya, "langgam" yang dimainkan pemerintah pun belum dapat dipahami oleh NU. Saling curiga menjadi tak terelakkan. Bagi kalangan NU dan umat Islam pada umumnya, semua kebijakan pemerintah mengarah pada sekularisasi yang mengancam nilai-nilai agama. Bahkan ada kesan, pemerintah dengan sengaja menyebarkan benih sekularisasi itu

melalui sekolah-sekolah. Buku teks Pelajaran Moral Pancasila (PMP) yang dinilai 'mengambangkan' akidah dan menguntungkan pihak-pihak non-Islam, diprotes keras kalangan - tidak hanya NU tetapi- ummat Islam. Isu Kristenisasi juga menjadi bagian khotbah sehari-hari kalangan kiai dan pemimpin Islam. Meski tak satu pun bukti yang menguatkan kebenaran isu itu, tetapi pemerintah dituding telah bertanggung jawab dengan maraknya gereja-gereja yang dibangun di 'kawasan hijau' yang selama ini masih 'steril.' Banyaknya menteri beragama Kristen adalah salah satu "bukti" kesengajaan pemerintah untuk mengikis akidah Islam.

Isu semacam itu lebih lanjut menjadi semangat ummat Islam untuk menegaskan diri sebagai "kelompok yang tak bisa diremehkan." Di tengah-tengah masyarakat, muncul fenomena maraknya pengajian-pengajian, tidak hanya di kampung, tetapi di kampus-kampus. Pemakaian jilbab bagi remaja putri Islam, seolah menjadi kewajiban baru untuk menunjukkan identitas. Kelompok-kelompok pemuda Islam bahkan telah bergerak sangat jauh, dengan munculnya "kelompok Islam radikal," apalagi diilhami semangat revolusi Iran di awal 1980-an. Pertentangan antara Islam dan Pemerintah menjadi pertentangan terbuka, setelah sekelompok pemuda Islam merebut senjata dari sebuah kantor polisi, aksi pembajakan pesawat Garuda di Thailand dan meledaknya kerusuhan massa di Tanjung Priok. Pemerintah lalu merasa mempunyai bukti kuat, bahwa ummat Islam tidak sekedar berposisi di parlemen, tetapi telah jauh melangkah menjadi gerakan subversi dengan tujuan menggulingkan pemerintah yang sah dan mengganti negara RI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 menjadi negara Islam. Dengan dalih itu, banyak aktivis Islam diadili dengan berbagai peradilan subversi. Di antara mereka dihukum mati dan dieksekusi, dan lainnya dipenjarakan untuk beberapa waktu lamanya.

Di tengah kegalauan situasi seperti itu, sikap pemimpin Islam pun bermacam-macam, tetapi secara sederhana dapat dikelompokkan menjadi dua. Yaitu mereka yang ingin "menyelamatkan Islam" dan mereka yang ingin "menyelamatkan bangsa" (termasuk di dalamnya Islam). Kalangan yang pertama menganggap semua itu kesalahan pemerin-

tah yang tidak mau mengakui eksistensi ummat Islam sebagai mayoritas penduduk negeri ini. Sambil meyakinkan bahwa ummat Islam tidak akan mendirikan negara Islam, mereka menuntut, mayoritas Islam harus diakui dan direpresentasikan dalam penyelenggaraan negara. Sedangkan pada kelompok yang menginginkan "keselamatan bangsa," semua peristiwa yang buruk itu akibat kesalahpahaman kedua belah pihak, ya pemerintah ya ummat Islam. Ummat Islam tidak pernah akan mendirikan negara Islam. Di negeri ini, ummat Islam hanya memerlukan kebebasan melaksanakan akidah dan ibadahnya, tanpa dicampuri oleh negara. Berbeda dengan kelompok pertama, kelompok kedua hanya menuntut pemerintah memahami tradisi-tradisi keagamaan, memperlakukan semua kelompok (agama, etnik, profesi, dll.) seadil-adilnya, tentu dengan mekanisme demokratis sebagaimana layaknya sebuah bangsa yang beradab.

Di kalangan NU, kedua kecenderungan itu sama-sama kuat. Namun ada sekelompok kecil kalangan (terdiri dari perpaduan tua dan muda) di dalam NU yang berupaya meyakinkan semua pihak -terutama di dalam NU sendiri- untuk mengakhiri semua ketegangan dengan pemerintah. Kelompok kecil ini sebetulnya lebih merupakan "gerakan arus bawah" yang dalam banyak hal berbeda dengan kalangan resmi NU. Sejak wafatnya Kiai Bisri, kelompok ini lebih rajin mengenalkan jargon *kembali ke khittah 1926*. Secara sistematis, kelompok ini mulai menyusun rencana mengubah visi NU, dimulai dari keterlibatannya meng-goal-kan Kiai Ali Maksum sebagai Rais Aam dalam Munas NU 1981 di Kaliurang, Yogyakarta. Selanjutnya, bersama Rais Aam ini, disusun upaya mengganti Ketua Umum, Dr. Idham Chalid tanpa melalui muktamar, dengan cara "peletakan jabatan secara sukarela" karena alasan kesehatan. Meski upaya ini gagal, namun kelompok kecil ini berhasil menyelenggarakan Munas NU 1983 di Situbondo yang sangat bersejarah itu. Di dalam Munas itulah dituntaskan segala ganjalan politik yang selama ini membuat perjalanan NU selalu dicurigai oleh pemerintah. Yang paling menonjol dalam memainkan peranan di dalam kelompok kecil itu adalah Kiai Achmad Siddiq dan Abdurrahman Wahid. Munas 1983 itu pula

yang melapangkan jalan bagi keduanya untuk menduduki tempat tertinggi di dalam NU, masing-masing sebagai Rais Aam dan Ketua Umum Tanfidziyah.

Tafsir Aswaja : "Kasus" Kiai Achmad

Suatu pemikiran tidak lahir dari ruang hampa. Dengan anggapan ini, dan dengan paparan serba ringkas mengenai kepolitikan Orde Baru di atas, kita dapat memahami *setting* sosial politik apa yang mewadahi pemikiran Kiai Achmad, sehingga ia menjadi sangat bermakna dalam kehidupan Nahdlatul Ulama maupun bangsa Indonesia pada umumnya. Tidak terlalu mengejutkan jika Kiai Achmad mendapat pujian dari banyak kalangan, meskipun ada saja sinisme terhadap sikap akomodatifnya. Dalam pandangan Dr. Norcholish Madjid, Kiai Achmad adalah ulama modern yang berpandangan luas, positif cara berpikirnya dan sangat toleran. (*Jawa Pos*, 25/1/1991) Sementara menurut Abdurrahman Wahid, Kiai Achmad berjasa dalam bentuk ekstrem. "Ini merupakan sumbangan besar yang diberikan Kiai Achmad Siddiq bagi pemerintah dan bangsa Indonesia. Dan ini dirasakan benar oleh pemerintah dan kalangan non-Muslim." (*Kompas*, 26/1/1991) Sinisme muncul – meskipun hanya di kalangan sangat terbatas – menganggap Kiai Achmad telah terkooptasi oleh pemerintah. Sementara kalangan (yang tak etis jika disebutkan namanya) menganggap "Kiai Achmad adalah 'Kiai Pancasila'."

Secara umum, pemikiran Aswaja Kiai Achmad tidak terlalu berbeda dengan pemikiran yang telah berkembang selama ini, baik pada tingkat kesadaran ontologisnya sebagai "kelompok yang paling selamat (*al-firqah al-najiyah*) di antara firqah-firqah yang ada dalam Islam, maupun dalam metodologi pemikiran yang menjadi 'paradigma' Aswaja, seperti dalam hal keterikatan pada madzhab *salaf*. Sehingga secara sepintas memang tak ada yang 'baru' dalam pemikiran Kiai Achmad. Bagi kalangan intern NU, istilah-istilah teknis seperti *tawasuth*, *tawazun*, *i'tidal*, sudah menjadi konsumsi sehari-hari. Tetapi pemekaran pemahaman yang dilakukan oleh Kiai Achmad atas istilah teknis itu sehingga menjadi karakter Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah "yang serabutpun tak bergeser dari

karakter agama Islam," berimplikasi sangat jauh dalam kehidupan Indonesia kontemporer. Dengan demikian, karena wataknya yang moderat, Islam menentang sikap ekstrem (*tatharruf*, *ghuluw*) dalam segala bentuknya. Meskipun ajaran Islam merupakan kebenaran yang final, namun dalam hal ini tidak dengan sendirinya menjadikan penganutnya bersikap eksklusif dan konfrontatif dengan 'kebenaran-kebenaran lain.' Kebenaran agama lain atau kebenaran ideologi haruslah ditempatkan pada posisinya sedemikian rupa sehingga tidak terjadi perbenturan satu dengan yang lain. Penganut agama selain Islam, misalnya, harus memperoleh haknya untuk hidup secara damai berdampingan. Ummat Islam perlu mengembangkan sikap solidaritas (*ukhuwah*) dengan ummat lain. Hal ini didasarkan pada interpretasi atas kata "ummat" sendiri. Bagi Kiai Achmad kata *ummat*, sepanjang pengalaman kenabian, memuat sekaligus tiga pengertian. Pertama, ummat adalah satu kelompok dengan ikatan agama (ummat Islam, ummat Kristiani, ummat Hindu, dll.). Kedua, satu kelompok dengan ikatan kebangsaan (ummat Indonesia). Ketiga, semua kelompok manusia (ummat manusia). Solidaritas (*ukhuwah*) dengan demikian harus dikembangkan dengan cakupan tiga hal tersebut, sehingga terdapat *ukhuwah Islamiyah* (solidaritas dengan sesama Muslim), *ukhuwah wathaniyah* (solidaritas kebangsaan) dan *ukhuwah basyariyah* (solidaritas kemanusiaan). Secara internal, ketiga bentuk solidaritas itu bersifat mengikat menjadi komitmen Islam.

Bagaimana Islam (baca: NU) memandang ideologi? Tampaknya rumusan Kiai Achmad tentang agama dan ideologi ini menjadi monumental, dalam konteks bahwa pada masa 1980-an, Islam telah dihadapkan begitu rupa dengan ideologi negara, Pancasila. Agama Islam adalah wahyu Allah, bukan hasil pemikiran manusia, bahkan bukan hasil pemikiran sang Rasul. Agama (Islam) adalah *wadl'un ilahiyun*. Seorang pemeluk agama boleh saja berfilsafat, berideologi, berbudaya, asalkan ideologi dan sebagainya itu "tidak bertentangan dengan ajaran agamanya." Agama dan ideologi harus ditempatkan pada tempatnya masing-masing. Ideologi dan agama tidak selalu merupakan dua hal yang harus dipilih salah satu dan sekaligus dibuang yang lain. Dalam hubungan antara

agama dan Pancasila, keduanya dapat sejalan, saling menunjang dan saling mengokoh-kuatkan. Namun diingatkan, bahwa dalam agama saja ada larangan *al-ghuluw fi al-din* (berlebih-lebihan dalam menerapkan ajaran agama), maka pantas sekali kalau ada pencegahan terhadap *al-ghuluw fi Pancasila*. Karena itu, sangat tepat jaminan pemerintah, bahwa Pancasila tidak akan diagamakan, dan agama tidak akan dipancasilakan. Masalahnya, bagaimana membuat keduanya menjadi proporsional. Hambatan untuk "proporsionalisasi" yang muncul selama ini lebih bersifat psikologis. Yakni kecurigaan dari dua arah bersilangan (pemerintah dan Islam, *pen.*) bahwa negara RI akan dijadikan negara agama tertentu yang merugikan pemeluk agama lain. Dan bahwa Pancasila akan dijadikan 'agama nasional,' menggantikan (atau mendangkal-kan jiwa) agama-agama. (*Warta NU*, Maret 1986).

Seharusnya, menurut Kiai Achmad, dengan diundangkannya UUD 1945, kecurigaan itu dapat diatasi. Semua pihak harus hanya memiliki pemahaman dan persepsi tentang Dasar Negara menurut bunyi dan maknanya yang terkandung dalam UUD 1945. (Makalah pada Munas 1983). Tetapi situasi, kondisi, dan permainan politik ada kalanya memberikan kesempatan bagi kambuhnya kecurigaan itu. Karena itu perlu ditegaskan, bahwa Pancasila dan UUD 1945 merupakan satu kesatuan, bukan hal yang berdiri sendiri. Oleh karena itu, Kiai Achmad menyarankan, "sebaiknya kita mengucapkan/menulis: Pancasila menurut UUD 1945, bukan Pancasila dan UUD 1945." Pancasila, kata Kiai Achmad, tidak diberi makna yang berbeda dengan UUD 1945. (*Ibid.*)

Tampaknya, pandangan Kiai Achmad inilah yang kemudian oleh Munas NU 1983 dikukuhkan menjadi "deklarasi" penerimaan Pancasila sebagai asas tunggal. Deklarasi itu selengkapnya berbunyi:

1. Pancasila sebagai dasar dan falsafah Negara Republik Indonesia bukanlah agama, tidak dapat menggantikan agama dan tidak dapat dipergunakan untuk menggantikan agama.
2. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai

dasar Negara Republik Indonesia menurut pasal 29 ayat (1) UUD 1945 yang menjiwai sila-sila yang lain mencerminkan Tauhid menurut pengertian keimanan dalam Islam.

3. Bagi Nahdlatul Ulama, Islam adalah agidah dan syari'ah, meliputi aspek hubungan manusia dengan Allah dan hubungan antar manusia.
4. Penerimaan dan pengamalan Pancasila merupakan perwujudan dari upaya umat Islam Indonesia untuk menjalankan syari'at agamanya.
5. Sebagai konsekuensi dari sikap di atas, Nahdlatul Ulama berkewajiban menjaga pengertian yang benar tentang Pancasila dan pengamalannya yang murni dan konsekuen oleh semua pihak.

Formulasi di atas sekaligus menepis anggapan eksternal, bahwa NU mempunyai "agenda tersembunyi," terutama berkaitan dengan upaya-upaya berposisi dalam parlemen selama ini. Hal ini diyakinkan lagi dengan pandangan Kiai Achmad tentang negara Indonesia sendiri. Bagi Kiai Achmad, negara kesatuan Republik Indonesia adalah bentuk final dari seluruh upaya penduduk Nusantara, termasuk umat Islam, dalam mencari bentuk negara. Pendapat ini didasarkan pada keputusan *fiqhiyah* yang pernah diambil pada Mukhtamar NU di Banjarmasin 1935, bahwa Indonesia adalah *dar al-Islam*. Di samping pengesahan secara *fiqhiyah* itu, Kiai Achmad membeberkan bukti keterlibatan umat Islam, khususnya NU, dalam membentuk dan mempertahankan negara RI. Menurut Kiai Achmad, semua bentuk keterlibatan umat Islam dalam negara RI itu bukan dilandasi semata-mata masalah taktis-politis, tetapi pertama-tama muncul sebagai pemenuhan "kewajiban keagamaan."

Tafsir keagamaan Kiai Achmad tentang masalah-masalah sosial dan politik di atas, yang berdasarkan pemahamannya atas *Aswaja*, terasa sangat otentik dan jujur dalam kedudukannya sebagai ulama dan pemimpin ormas Islam dalam menghadapi konteks politik yang cukup rumit dan "berbahaya." *Allahu a'lam bi al-shawab*.

M. Imam Aziz